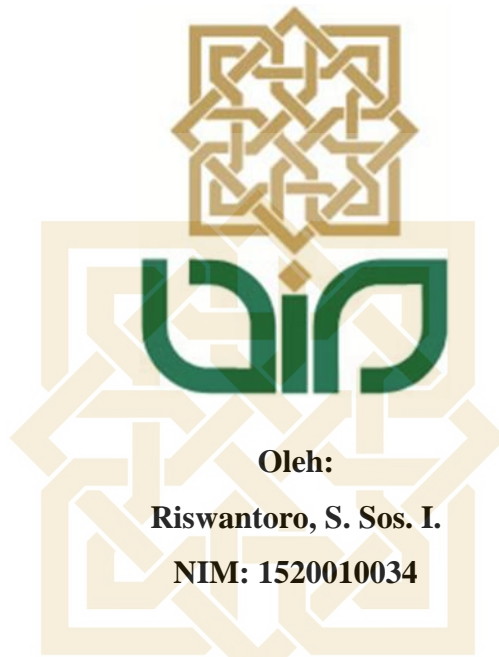


KONVERSI PENYALURAN BANTUAN TUNAI KE NON TUNAI

(Studi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Dlingo)



Oleh:

Riswantoro, S. Sos. I.

NIM: 1520010034

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A.)**

**Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies**

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Riswanto, S.Sos.I.**
NIM : 1520010034
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 4 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Riswanto, S.Sos.I.

NIM : 1520010034

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Riswanto, S.Sos.I.**
NIM : 1520010034
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Riswanto, S.Sos.I.

NIM : 1520010034



PENGESAHAN

Tesis Berjudul : KONVERSI PENYALURAN BANTUAN TUNAI KE NON TUNAI
(Studi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Dlingo)

Nama : Riswantoro, S.Sos.I.

NIM : 1520010034

Jenjang : Magister (S2)


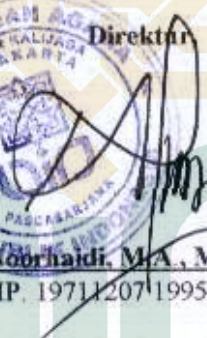
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Tanggal Ujian : 15 Januari 2019

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Master of Arts (M.A.).

Yogyakarta, 29 Januari 2019


Direktur

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Pd., Ph.D.
NIP. 19711207199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis berjudul : KONVERSI PENYALURAN BANTUAN TUNAI KE NON TUNAI
(Studi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Dlingo)

Nama : Riswantoro, S.Sos.I.

NIM : 1520010034

Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Kosentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Dr. Roma Ulinnuha, M.Hum. (

Pembimbing/Penguji : Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, M.Si. (

Penguji : Dr. Ro'fah, S.Ag., BSW., MA. (

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 2019

Waktu : 14.00 – 15.00 WIB

Hasil/Nilai : 95/A

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude*

*Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

KONVERSI PENYALURAN BANTUAN TUNAI KE NON TUNAI
(Studi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Dlingo)


Yang di tulis oleh :

Nama : **Riswantoro, S.Sos.I.**
NIM : 1520010034
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Kosentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (MA).

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Yogyakarta, 4 Januari 2019
Pembimbing



Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.

Abstrak

Pemerintah telah berulang kali mencoba mengentaskan kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program jaminan sosial yang dalam jangka panjang bertujuan memutus rantai kemiskinan. Program ini terus mengalami penyempurnaan, salah satu revisinya adalah munculnya konversi penyaluran bantuan yang semula dari tunai menjadi non tunai seperti termuat dalam Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Konversi tersebut bertujuan agar munculnya tiga T; tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, sehingga semakin transparansi. Namun setiap perubahan menimbulkan dampak di luar dari hasil utama yang direncanakan, apalagi di daerah yang jauh dari kota yang mana daerah Dlingo termasuk yang sulit untuk diakses. Oleh sebab itu pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak konversi penyaluran bantuan dari tunai ke non-tunai terhadap keluarga penerima manfaat PKH di Kecamatan Dlingo.

Guna menjawab pertanyaan di atas penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengambilan datanya dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengujian keakuratan data menggunakan tiga langkah yaitu menguji data dengan teori, menguji data dengan membandingkan perkataan informan di tempat umum dengan secara pribadi, dan pengecekan sumber data yang sama dengan metode yang berbeda..

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dampak konversi bantuan dari tunai ke non tunai telah menimbulkan dampak positif seperti, timbulnya peluang ekonomi yang termanifestasi dalam warung yang berjejaring dan meningkatnya transparansi penyaluran bantuan. Namun ditemukan di Dlingo, kebijakan ini menimbulkan dampak negatif yaitu munculnya gagap teknologi (*culture lag*) meliputi: saldo nol, pin terblokir, penyelewengan bantuan, gagapnya kontrol penyaluran, kesulitan akses penyaluran bantuan, rancunya teknis aduan, dan kegagapan pencairan bantuan. Dilihat secara teoritis penelitian ini melengkapi teorinya Riant Nugroho bahwa tujuan dari kebijakan sosial adalah mempercepat perubahan sosial dan mendorong kemampuan masyarakat untuk memecahkan setiap konflik secara damai. Namun, Riant hanya melihat persoalan kebijakan sosial tidak secara jangka pendek tetapi jangka panjang sehingga dampak jangka pendek soal gegar budaya luput dari analisisnya. Penelitian ini sudah menguatkan konsepnya Budi Winarno bahwa kebijakan/program baru cenderung sulit untuk diimplementasikan karena aktor dan strukturnya belum mapan. Namun teorinya Budi Winarno sendiri belum disebutkan secara mendetail dari dampak kebijakan/program baru, itu hanya sebatas peringatan untuk hati-hati dalam mengimplementasikan kebijakan baru. Oleh karena itu penelitian ini penting karena menjelaskan gagap teknologi (*culture lag*) yang muncul dalam kebijakan jangka pendek.

Kata Kunci: *Dampak, Konversi Bantuan, Program Keluarga Harapan, Culture Shock*

Motto

Majelis telah usai dan umur pun telah berakhir, Kami masih saja berada dalam awal sifat-Mu.¹



¹ Seyyed Ahmad Fazeli, "Tasybih dan Tanzih dalam Relevansi Syariat, dalam jurnal," *Mula Sadra: Jurnal Filsafat Islam dan Mistisisme*, Raustan Fikr, No. 5, Volume II tahun 2012.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk ibu, bapak, dan keluarga kecilku yang tercinta



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan sholawat salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, dan kita semua. Tesis dengan judul: **Dampak Konversi Penyaluran Bantuan Dari Tunai ke Non Tunai Terhadap Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Dlingo** dapat terselesaikan secara maksimal walaupun dengan intensitas semangat penulis yang naik-turun. Atas ridho dan pertolongan-Nya serta dari doa dari keluarga dan kawan-kawan tercinta penulisan tesis ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya penulis mendapatkan hal-hal yang baru, baik berupa pengetahuan, pengalaman, dan rasa cinta kasih sayang selama melakukan penelitian.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yaitu, Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., selaku Direktur Pascasarjana, Ibu Ro'fah, BSW., Ph.D., dan Dr. Roma Ulinuha, M.Hum., selaku ketua dan sekretaris prodi *Interdisciplinary Islamic Studies*. Terima kasih untuk seluruh dosen pascasarjana yang telah memberikan curahan ilmu pengetahuan yang begitu bermanfaat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si., selaku pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, saran, kritikan, serta gagasannya demi terwujudnya kesempurnaan

penulisan tesis ini. Penulis banyak belajar darinya tentang kesabaran, ketelitian, canda-tawa, dan singkat kata banyak sikap dan perilaku yang penulis ambil dari selama bimbingan darinya yang menentukan pada situasi-situasi krusial. Penulis ingin bermesrahan di pengantar ini karena telah menemukan sikap cinta, sebagaimana cinta seorang guru terhadap muridnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak H. Jaelani Rahmat dan Ibu Atiqah yang merupakan mertua penulis, karena darinya dorongan baik secara materi maupun nila kepada penulis untuk terus belajar pada semua hal hingga sampai pada proses masuknya penulis untuk melanjutkan kuliah di S2. Kepada Bapak Wanto Utomo dan Ibu Ngadirah yang merupakan orang tua kandung penulis dengan doanya dan dukungannya yang terus dipanjatkan dan diusahakan untuk kebaikan anaknya.

Kepada keluarga kecilku yang tercinta Indah Amalia istriku tercinta dan Ahmad Khalil Al Fawwaz anakku yang masih balita. Setiap kali kesedihan bersamamu adalah penawarnya. Engkau berdua yang terus setia menemani liku-liku tesis ini. Maafin ayah yang kala itu memarahimu nak, karena waktu itu engkau merusakkan keyboard saat mengetik penelitian ini, akhirnya baru ayah sadari bahwa engkau ingin membantu meringankan pekerjaan.

Penulis *haturkan* terima kasih untuk teman-teman Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik walaupun agak terlambat atas kebersamaannya selama proses akademik kepada Ahmad Muhlaz, Amril M., Aris A.H., Wildan, Fauzan, Agung,

Hery, Ayyung, dan Anies. Kita merupakan generasi yang awal untuk sebuah jurusan yang begitu penting pada negara ini.

Terima kasih untuk seluruh informan yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang jelas karena waktu luangnya untuk penulis wawancara telah banyak merepotkannya, dari yang disuguhi minuman sampai di ajak makan-makan. Teman-teman pendamping yang dengan waktu luangnya untuk sekedar *ngopi* bareng untuk melepas sejenak kepenatan, sambil terang-terangan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih untuk semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan yang mendorong tesis dapat terselesaikan. Moga-moga ilmu dan pengetahuan yang secara tidak langsung penulis terima dari semua pihak dapat bermanfaat untuk penulis dan untuk semua orang. Amin

Yogyakarta, 4 Januari 2019
Penulis,

Riswantoro, S.Sos.I.
NIN : 1520010034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN DLINGO:	
Sebuah Cerita Implementasi Program yang Efektif Menanggulangi	
Kemiskinan	32
A. Sekilas Pandang Kecamatan Dlingo	32
B. Sejarah PKH di Daerah Dlingo	34
1. PKH Dari Tahun 2008 - 2017	35
2. PKH Dari Tahun 2017 Sampai Sekarang.....	38
3. Model Penyaluran Bantuan PKH di Dlingo.....	41
C. Mekanisme Program Keluarga Harapan	46
1. Validasi Data: Seleksi Calon Peserta PKH	47

2. Pendampingan PKH	52
3. Verifikasi Data: Komitmen Peserta PKH	59
4. Melatih Jiwa Kewirausahaan	61
5. Komplementaritas Bantuan	62
D. Efektivitas PKH di Kecamatan Dlingo	63
E. Kesimpulan	66

BAB III KONSEP BANTUAN NON-TUNAI: Sebuah Konsep Pembangunan

Menuju Modern	67
A. Alasan Perubahan PKH	67
B. Manfaat Transaksi Non Tunai	73
C. Model Penyaluran Bantuan Non-Tunai	78
D. Kesimpulan	86

BAB IV EVALUASI KEBIJAKAN KONVERSI BANTUAN TUNAI KE NON TUNAI DAN MUNCULNYA GAGAP TEKNOLOGI

A. Gagap Teknologi Penerima Manfaat.....	88
1. Kelambatan Pelatihan: Munculnya Gejala Pin Keblokir	89
2. Kegagalan Pencairan Bantuan	100
3. Fungsi <i>e-Money</i> dalam Penyelewengan Bantuan.....	102
B. Kendala Infrastruktur.....	110
1. <i>Up-date</i> Data dan <i>Problem</i> Saldo Nol	111
2. Minimnya Akses Penyaluran	119
C. Kendala Mekanisme Palaporan	121
1. Rancunya Teknis Aduan	122
2. Kegagalan Kontrol Penyaluran	125
D. Analisis Penelitian.....	129
1. Gejala <i>Culture Lag</i> dalam Konversi Bantuan.....	129
2. Intervensi dan Perubahan Sosial	134
E. Kesimpulan	136

BAB V PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	140
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	144



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membincang kemiskinan sama seperti membicarakan sejarah kehidupan manusia yang tiada habisnya. Tema kemiskinan menjadi topik yang selalu hangat dan sekaligus menjadi perhatian banyak kalangan. Mengenai definisi kemiskinan sendiri sudah banyak diuraikan dari berbagai dimensi, mulai dari persoalan sederhana hingga yang sangat kompleks. Suryawati misalnya mendefinisikan kemiskinan secara sempit, kemiskinan dipahami sebagai kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup, sedangkan kemiskinan secara luas dipahami sebagai masalah multidimensional.¹ Sedangkan menurut Chambers sebuah kemiskinan merupakan konsep integrasi yang memiliki empat dimensi yaitu: ketidakberdayaan, kerentanan menghadapi situasi darurat, ketergantungan, dan keterasingan.²

Begitu rawannya dampak kemiskinan bagi kehidupan bernegara maka pemerintah berkewajiban menggulirkan dalam setiap kementerian untuk bersama memunculkan kebijakan “anti-kemiskinan”.³ Sebuah strategi “keroyokan” yang fokus menangani persoalan kemiskinan. Sebagaimana sebuah kebijakan tidak selalu berkorelasi positif terhadap kehidupan

¹Khaidiziah Isnaini, *Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto: Jurnal Administrasi Publik*, (Universitas Brawijaya, Vol.2, No.4, 2015), 709.

²Chriswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional: Jurnal JMPK Vol. 08, No. 03* (3 September 2005), 122.

³Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Pancasila Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), 135.

masyarakat, akan tetapi sebuah kebijakan selalu mempunyai dua mata sisi, kebijakan akan berkorelasi positif terhadap cita-cita yang dituju tetapi juga tidak bisa dipungkiri akan menimbulkan persoalan yang baru.⁴

Di dalam sebuah studi pembangunan pernah dilontarkan oleh Sadono Sukismo dalam bukunya *Ekonomi Pembangunan* bahwa ada efek dualisme pembangunan yaitu satu sisi menuju pada yang direncanakan dan di sisi yang lain memunculkan persoalan-persoalan baru yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu setiap perencanaan harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang matang dan didekati dari bermacam-macam sudut pandang.⁵ Supaya efek-efek yang negatif sekecil mungkin bisa ditekan.

Pendekatan pembangunan perlu untuk dibuka lebar-lebar dari kaca mata pembacaan dari segala arah untuk memformulasikan kebijakan yang tepat, dan menghindarkan dari kebijakan yang fatal. Ada sebuah ilustrasi menarik dari percakapan kera dengan ikan. Kera yang melihat ikan sedang asik berenang di air pahami oleh kera bahwa ikan itu meminta tolong untuk diangkat ke daratan agar selamat dari hanyutan air. Diambil ikan itu oleh kera ke daratan, dan apa yang terjadi maksud baik untuk menolong, karena

⁴Sebagaimana kebijakan yang bertujuan untuk pelestarian hutan dengan memindahkan pemukiman penduduk jauh dari kawasan hutan. Kebijakan itu berhasil memindahkan penduduk akan tetapi timbul persoalan baru. Lahan garapan penduduk tidak seluas semasa tinggal didekat hutan. Dan itu berdampak terhadap menurunnya pendampatan, buruknya sanitasi, belum lagi di tempat yang baru mereka kehilangan ritual-ritual yang berhubungan dengan hutan. Pemindahan pemukiman tersebut berhasil menjaga kelestarian hutan, disisi yang lain kehilangan budaya, buruknya kesehatan dan menurunnya ekonomi yang harus dialami. Tania Murray Li, *The Will to Improve* (Jakarta: Marjin Kiri, 2012), 140.

⁵ Sadono Sukismo, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2007), 34.

tidak memahami kehidupan ikan, akhirnya berakibat fatal dan meninggallah ikan tersebut.⁶

Program Keluarga Harapan (PKH)⁷ merupakan sebuah program yang didesain khusus oleh pemerintah dengan tujuan penanggulangan kemiskinan. Program itu terus mengalami tambal-sulam, misalnya saja dari visi-misi yang mana tujuan jangka panjang program itu yaitu untuk memutus rantai kemiskinan. Kondisi miskin harus “diaputasi” agar tidak menjalar ke anak turunnya. Sedangkan dalam jangka pendek mempunyai tujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan dasar keluarga, meningkatkan konsumsi keluarga, mendorong lahirnya dan berkembangnya ekonomi masyarakat, serta memangkas ketimpangan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin.⁸

Strategi yang diterapkan berupa stimulus yang mengadopsi konsep hukuman dan hadiah, oleh karena itu ada tahapan-tahapan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat. Singkatnya hadiah akan didapatkan apabila dapat memenuhi syarat-syarat yang ada di program PKH. Sementara bagi yang tidak komitmen terhadap syarat-syarat tersebut akan mendapatkan hukuman. Adapun terkait dengan hadiah, keluarga tersebut akan mendapatkan kelancaran bantuan, sedangkan bagi keluarga yang mendapatkan hukuman, bantuannya akan ditunda atau kalau sampai melanggar aturan yang berat bisa dikeluarkan dari keanggotaan PKH.⁹

⁶ Pajar Hatma Indara Jaya, *Analisis Masalah Sosial* (Yogyakarta: Senter, 2008), 24.

⁷ Selebihnya Program Keluarga Harapan disingkat PKH.

⁸ Pengarahan Ibu Rahayu ketua Bantuan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam Acra sosialisasi PKH di Kecamatan Dlingo pada tanggal 21 Januari 2018.

⁹ *Ibid.*

Di dalam penanggulangan kemiskinan ataupun pengentasan kemiskinan indikator keberhasilan ada pada perubahan perilaku. Adapun untuk sampai pada perubahan perilaku tersebut dimodifikasilah syarat-syarat yang ada di PKH, yang mana berisi step-step guna mendorong keluarga tersebut terbiasa mencukupi kebutuhan dasar sebagaimana pada masyarakat umumnya. Misalnya; bagi ibu hamil dibebani syarat untuk memeriksakan kehamilannya sesuai jadwal dari fasilitas kesehatan, anak sekolah mempunyai kewajiban untuk disiplin hadir di sekolah, sementara lansia wajib untuk kontrol kesehatan di posyandu lansia.¹⁰

Model yang dipakai dalam penyaluran bantuan sejenis bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer*) yang mana di dalam penyalurannya bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu bank sebagai jasa penyalur bantuan. Karena model penyalurannya menggunakan transfer maka setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan kartu anggota penerima program PKH. Kartu tersebut berfungsi ganda yaitu, sebagai kartu peserta dan sebagai alat transaksi atau ATM.

Model penyaluran ini merupakan perbaikan dari penyaluran sebelumnya yaitu menggunakan tunai. Sistem tunai mengharuskan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan uang cash setiap penyaluran. Sementara sistem tunai tersebut dikonversi atau dirubah dengan sistem non tunai. Pada sistem non tunai ini penyalurannya menggunakan ATM, kondisi tersebut membuat keluarga penerima manfaat tidak secara langsung

¹⁰ Modul Bimtek Program Keluarga Harapan tahun 2016

mendapatkan uang cash, akan tetapi ada pengendapan sejenak bantuannya di bank penyalur. Sehingga ini memungkinkan uang tersebut masuk ke dalam tabungan masing-masing keluarga penerima manfaat.¹¹

Adapun konversi tersebut dalam hal model penyaluran bantuan mempunyai beberapa asumsi yaitu kemudahan yang akan didapatkan keluarga penerima manfaat seperti pelayanan yang ramah dan terstandarisasi. Tentunya dengan menggunakan ATM, bagi keluarga penerima manfaat dapat mencairkan bantuannya kapan saja, berapa saja, dan dimana saja. Tidak terikat waktu dan tempat, asal di sana ada tempat untuk transaksi dengan ATM, maka di tempat tersebut dapat dilakukan pencairan bantuan. Pada akhirnya keluarga penerima manfaat sudah tidak perlu antri lagi dalam pengambilan bantuan setiap kali bantuan turun.¹²

Atas asumsi di atas pada tahun 2017 model penyaluran bantuan dikonversi dari yang semula tunai menjadi non-tunai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.¹³ Ada tiga sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan penyaluran model non-tunai yaitu jargon 3T: tepat waktu penyaluran, tepat sasaran keluarga penerima manfaat, dan tepat jumlah bantuan. Dari ketiga jargon tersebut mengarah pada istilah yaitu transparansi.¹⁴

Namun, apakah gambaran keluarga penerima manfaat tersebut terjadi di setiap daerah. Berdasarkan latar belakang masalah ini perlu memeriksa dan

¹¹ Buku panduan Program Keluarga Harapan tahun 2016.

¹² *Ibid.*

¹³ Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.

¹⁴ *Ibid.*

mengevaluasi dari konversi penyaluran bantuan PKH yang semula dengan model tunai menjadi non-tunai. penelitian ini memeriksa apakah asumsi kemudahan yang ditawarkan yang terjadi seperti di kota-kota juga akan terjadi kemudahan juga di daerah Dlingo. Sementara ini wilayah Kecamatan Dlingo tergolong bertipologi pedesaan yang mana akses untuk ATM masih langka. Secara geografis terkendala dengan jalan yang naik turun sehingga menyulitkan akses untuk mobilisasi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan dari latar belakang masalah di atas pertanyaan yang peneliti ajukan adalah bagaimana implementasi dan implikasi kebijakan konversi bantuan dari tunai ke non-tunai Program Keluarga Harapan di Kecamatan Dlingo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini melengkapi khasanah kebijakan publik khususnya pada ranah intervensi kebijakan. Penelitian ini juga dapat digolongkan pada studi pedesaan, yang mana sedikit banyak mengupas struktur masyarakat desa. Di samping itu juga sebagai wujud kontribusi peneliti pada studi Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik (IPKP) dan kajian pemberdayaan masyarakat (*community development*) dalam kiprahnya mengentaskan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semoga dapat melengkapi referensi guna memberikan sudut pandang yang lain dalam hal pengambilan kebijakan sosial.

D. Kajian Pustaka

Jenis penelitian dan kajian kepustakaan yang berkaitan dengan pemberian stimulus baik secara tunai maupun non tunai kaitannya dengan perubahan sosial, bukan hal yang baru lagi. Hasil penelitian sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain dari berbagai kalangan. Maka untuk mengetahui kebaruan dan keaslian yang akan dihasilkan dalam penelitian ini perlu penulis sajikan beberapa hasil kajian yang sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian itu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Astri Sani dan Utami Dewi,¹⁵ Jantji Manday dan M. Jonru,¹⁶ dan Agus Purwanto¹⁷ merupakan jenis penelitian kualitatif dengan subyek penelitian keluarga penerima manfaat yang mengikuti Program Keluarga Harapan. Adapun yang menjadi obyeknya Astri Sani dan Utami Dewi menyoroti soal kinerja pelaksanaan PKH. PKH akan berjalan dengan baik jika mematuhi standar operasional pelaksanaan (SOP). Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Jantji Manday dan Jonru M. Ruru yang mengoreksi kebijakan PKH tidak efektif. Rumus yang digunakan yaitu semakin efektif program semakin mensejahterakan, akan tetapi temuannya, PKH tidak mampu mengurangi kemiskinan yang disebabkan tidak tepat sasaran. Kemudian Agus Purwanto yang menyoroti soal implementasi kebijakan PKH dengan temuan bahwa program tersebut

¹⁵ Astri Sani dan Dewi Utami, *Kinerja Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan dalam Optimalisasi Program Keluarga Harapan di Kota Yogyakarta: Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol.3, No. 2 (Agustus 2010), 103.

¹⁶ Jantji manday dan Jonru M. Ruru, *Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen: Jurnal Wacana*, Vol 16, No 2 (Tahun 2013), 79.

¹⁷ Agus Purwanto, *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Memutus Rantai Kemiskinan: Skripsi* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNHAS, 2013).

berjalan dengan cukup baik sesuai rencana. Terbukti peserta PKH yang rata-rata rumah tangga sangat miskin mendapat pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Berkat program itu peserta PKH terfasilitasi untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan keluarganya.

Penelitian yang dilakukan oleh Tania Murrai Li yang meneliti sisi-sisi gelap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibungkus melalui tema “pembangunan” di Sulawesi, telah memberikan gambaran yang komplrit mengenai dampak suatu kebijakan. Obyek penelitian ini mengambil massa sebelum kemerdekaan sampai eranya Orde Baru. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan mempunyai dampak buruk yang luput dari ramalan. Tania juga ingin mengatakan bahwa para peramal terlalu terkukung dan lebih menyederhanakan masalah.¹⁸

Dari penelusuran penulis sejauh ini belum ada penelitian yang dalam satu program PKH yang meneliti tentang konversi penyaluran bantuan yang meneliti konversi penyaluran bantuan dari tunai menjadi non tunai. Sementara itu terkait dengan evaluasi sebuah program pemerintah sebagaimana dikupas dalam penelitiannya Tania yang menyimpulkan bahwa program pemerintah berdampak buruk dalam jangka panjang, hal tersebut disebabkan tidak lengkapnya analisa dalam penyusunan kebijakan. Sedangkan penelitian ini lebih banyak mengupas evaluasi program

¹⁸ Tania Murray Li, *The Will to Improve* (Jakarta: Marjin Kiri, 2012), 140.

pemerintah dalam jangka pendek, sehingga antara penelitian yang dilakukan Tania dengan penelitian ini jelas berbeda.

E. Kerangka Teoritis

1. Konversi sebagai bagian dari Kebijakan Sosial

Sebelum menjelaskan pengertian kebijakan konversi sebagai bagian dari kebijakan sosial. Lebih awal penulis sajikan definisi dan domain dari kebijakan publik, sekaligus diuraikan perbedaan antara kebijakan publik dengan kebijakan sosial yang mana ini sering terjadi salah pengertian dan sering tumpang tindih. Dan terakhir menyajikan teori bahwa konversi sebagai bagian dari kebijakan sosial. Hal ini tidak lepas dari pandangan Riant Nugroho bahwa kasus untuk negara berkembang pembangunan tidak cukup jika hanya mengakuisisi kebijakan publik saja akan tetapi harus masuk lebih jauh dengan kebijakan sosialnya.¹⁹

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.²⁰ Sementara Harold Laswell mendefinisikan kebijakan publik sebagai program yang terproyeksi dari cita-cita, nilai, dan praktik. Lebih sederhana lagi pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh David Easton bahwa kebijakan publik semua mencakup dampak positif-negatif dari semua aktivitas pemerintah.²¹ Dari ketiga tokoh pakar kebijakan publik sama-sama mempunyai arti penting dari kebijakan publik yaitu

¹⁹ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 40.

²⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, (Yogyakarta: CAPS, 2016), 20.

²¹ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara . . .*, 43.

bagaimana mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saing.²²

Menurut Riant Nugroho ada tiga alasan mengapa pengertian kebijakan publik itu cenderung sulit untuk didefinisikan atau kalau mudah banyak sekali ragamnya hal ini; pertama, karena kebijakan publik itu mempunyai banyak definisi. Kedua, kebijakan publik lebih dimaknai sebagai ilmu ketataprajaan atau ilmu usaha negara. Ketiga, negara saat ini sudah mulai berkembang dan istilah kebijakan publik tidak cukup hanya soal ilmu usaha negara, dimana cara mengurus negara mulai bergeser yaitu mengadopsi model organisasi perusahaan sebagai contohnya negara memiliki Badan-Badan Usaha Milik Negara yang dikelola bukan oleh negara.²³

Kebijakan publik dapat dibedah menjadi lima tingkatan secara luas wilayah cangkupannya diantaranya: pada tingkatan yang paling dasar kebijakan publik juga dipahami sebagai birokrasi. Birokrasi adalah kegiatan yang berkenaan dengan implementasi kebijakan publik yang telah dibuat sebelumnya oleh lembaga-lembaga perwakilan publik. Jadi birokrasi ini merupakan wadah kegiatan sehari-hari dari sebuah pemerintah yang paling sederhana dan mencakup hal-hal yang bersifat teknis dari begitu banyak manusia.

Tingkatan yang kedua dinamakan pemerintah atau eksekutif adalah sebuah cara dimana tujuan pemerintah dicapai. Wewenang eksekutif ini

²² Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: Elex Media Komputimbo, 2009), 142.

²³ Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 98.

dapat dibedakan dengan legislatif dan yudikatif. Dimana eksekutif merupakan bagian yang menjalankan kebijakan, legislatif kelompok yang membuat peraturan, dan yudikatif yang mengawasi. Orang yang paling tinggi di wilayah eksekutif ini adalah presiden, menteri, gubernur, dan bupati.

Di tahap ketiga merupakan negara (*state*). Konsep negara disini mengacu pada tiga lembaga politik yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan pemahaman seperti ini maka sektor negara atau negara dinilai sebagai lembaga yang mengelola urusan-urusan pelayanan publik yaitu yang bersifat melayani masyarakat apapun bentuk dan prosesnya.

Kelompok yang ketiga dinamakan negara-masyarakat. Di dalam kelompok ini kebijakan publik adalah suatu tindakan untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan publik yang sebesar-besarnya. Nama lain dari kelompok negara-masyarakat sering disebut juga dengan model pemerintahan yang baik, dimana gagasan ini diperkuat dengan munculnya konsep pengelolaan negarayang mendukung kemitraan antara negara dengan masyarakat.

Pada tingkatan yang paling tinggi atau paling luas cangkupannya kebijakan publik sering dinamakan juga dengan pemerintahan global. Hal ini mengingat bahwa disaat ini sejumlah lembaga multinasional telah ikut serta berpartisipasi bahkan mengambil peran penting dalam pengelolaan global. Di dalam era globalisasi lembaga-lembaga dunia

mempunyai pengaruh yang kuat sehingga akan mempengaruhi kondisi nasional.²⁴

Sementara itu kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik dan mempunyai beragam definisi. Paling tidak ada tiga dimensi dalam kebijakan sosial yang tidak bisa dipisahkan dan selalu melekat yaitu, pembangunan sosial, kesejahteraan sosial, dan keadilan sosial. Sementara itu terkait dengan definisi menurut Kenneth E. Boulding suatu istilah yang kabur karena batas-batasnya sulit untuk didefinisikan, sementara isinya kaya. Sedangkan Richard Titmus mendefinisikan kebijakan sosial sebagai solusi terhadap alokasi berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial yang mencakup: administrasi sosial, pelayanan sosial, kesejahteraan sosial, dan negara kesejahteraan.²⁵

Ada perbedaan cara pandang tentang kebijakan sosial di negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Untuk negara-negara maju pendekatannya melalui administrasi sosial yang diperuntukan bagi mereka yang terlibat dalam usaha-usaha sosial dan amal. Oleh karena itu arah dari sebuah kebijakan sosial tersebut dipergunakan untuk memecahkan permasalahan. Sementara di negara-negara berkembang kebijakan sosial tidak berhenti pada memecahkan permasalahan tetapi merujuk pada proses mempercepat perubahan sosial. Sama juga suatu

²⁴ *Ibid*, 108 – 116.

²⁵ Riant Nugroho, *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 23-25.

perubahan yang dipaksakan. Oleh sebab itu pembangunan sosial selalu direncanakan, direkayasa, dan dikendalikan.

Tujuan utama dalam kebijakan sosial adalah mendorong kemampuan masyarakat untuk memecahkan setiap konflik secara damai. Sebagaimana dalam setiap kebijakan sosial selalu menciptakan masalah baru seperti ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakstabilan sosial. Mengapa ini bisa terjadi? Menurut Riant Nugroho setiap pembangunan ada fasa “malturitas” ibarat manusia ada 2 meter, 100 kilogram anak laki-laki berusia 12 tahun yang secara fisik seperti seorang laki-laki dewasa.

Terkait dengan model-model kebijakan sosial, ada tiga bentuk yang telah diterapkan di berbagai negara: *pertama*, model kebijakan sosial yang menempatkan pengurangan kemiskinan sebagai agenda inti. *Kedua*, model kebijakan sosial yang memfokuskan pada perlindungan orang-orang bekerja. *Ketiga*, model kebijakan sosial yang memberikan perlindungan minimum bagi semua orang dan melindungi pendapatan masyarakat.²⁶

Kebijakan ada karena fungsi yang ditunjukkannya dan keberadaan kebijakan tergantung pada kapabilitas melayani fungsi yang dilakukannya. Sebagaimana ungkapan tersebut dikemukakan oleh Siti Hajar yang dikutip oleh Riant Nugroho, ada lima fungsi kebijakan sosial:

- a. Sebagai mekanisme perubahan,
- b. Untuk melegitimasi status quo,

²⁶ *Ibid* . . . , 35-36.

- c. Sarana meligitimasi hukuman dari tatanan sosial dan hukum,
- d. Untuk memecahkan kebutuhan sosial dan masalah sosial,
- e. Instrumen untuk membentuk masyarakat dan menyebarkan tahapan perekonomian dan sumber daya sosial.

Terkait dengan kebijakan konversi bukan merupakan yang pertama dilakukan oleh pemerintah, masih terngiang di dalam ingatan tentang konversi minyak tanah menjadi bahan bakar gas yaitu tujuan utamanya adalah efisiensi yang mana dilakukannya konversi dikarenakan harga minyak tanah yang meroket sementara pengguna oleh pemerintah masih di subsidi sehingga terjadilah penyalahgunaan diantaranya di diselundupkan atau dijual ilegal.²⁷

Program konversi sendiri mempunyai arti perubahan, maka di dalam perubahan atau pengkonversian lebih banyak ditemukan proses *top down* yang mana, program itu awalnya didesain oleh pemerintah dengan maksud untuk meningkatkan perbaikan-perbaikan ataupun pelayanan publik.²⁸ Oleh sebab itu dari analisa Ellista dan R. Rahmadani Dey dapat diambil prinsip-prinsip konversi sebagaimana penulis simpulkan ada 4 yang meliputi: efisiensi, kemampuan hitung (*caculabiy*), kontrol, kemampuan memprediksi.

²⁷ Ellista Vikalista, "Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG (Liquifiet Petroleum Gas) di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Vol. 2, 2012, 47.

²⁸ Rahmad Rahmadani Dey, "Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, 2013, 11.

2. Birokrasi dan Teknis Penyusunan Program

Salah satu pendekatan umum yang dipakai untuk memahami bagaimana suatu program itu dibuat adalah dengan mengidentifikasi langkah-langkah tertentu yang berurutan mulai dari perumusan masalah, identifikasi sasaran, perancangan dan evaluasi alternatif kebijakan, hingga pemilihan alternatif keputusan. Cara pandang seperti ini menurut Wahyudi Kumorotomo akan sangat bermanfaat untuk menemukan keteraturan atau menstrukturkan dari sebuah yang kompleks.²⁹

Telah diuraikan di awal bahwa ada lima susunan di dalam suatu kebijakan tempat pengimplementasian suatu kebijakan yaitu tingkatan yang paling tinggi adalah tingkat global, di bawahnya negara-masyarakat, lalu negara, disusul pemerintah, kemudian terakhir birokrasi. Pada setiap tingkat masing-masing mempunyai dampak tersendiri dari implementasinya. Uraian mengenai birokrasi sebenarnya sudah lama diulas, yaitu pertama kali pertama Max Weber mengamati pemerintahan di Prusia atau Jerman Kuno. Menurutnya ada ciri-ciri organisasi itu dinamakan birokrasi yaitu:³⁰

- a. Para anggotanya (staf) secara pribadi bebas, dan hanya melakukan tugas-tugas impersonal dari jabatn-jabatannya.
- b. Terdapat hierarki jabatan yang jelas.
- c. Fungsi-fungsi jabatan diperinci dengan jelas.
- d. Para pejabat diangkat berdasarkan kontrak.

²⁹ Wahyudi Kumorotomo, *Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1974 – 2004*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 25.

³⁰ Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi . . .*, 110.

- e. Diseleksi atas dasar kualifikasi profesional yang secara ideal diperkuat dengan diploma yang diperoleh melalui ujian.
- f. Mereka digaji dengan uang dan biasanya mempunyai hak-hak pensiun.
- g. Pekerjaan pejabat ialah pekerjaannya satu-satunya.
- h. Terdapat struktur karier dan kenaikan pangkat adalah yang mungkin baik melalui senioritas ataupun prestasi dan sesuai dengan penilaian para atasan.
- i. Pejabat tidak boleh mengambil kedudukannya sebagai miliknya pribadi begitu pula sumber-sumber yang menyertainya.
- j. Pejabat tunduk pada pengendalian yang dipersatukan dan kepada sistem disipliner.

Berbicara masalah birokrasi berarti membicarakan suatu sifat yang berkaitan erat dengan hal-hal yang teknis. Pengertian teknis ini dapat disejajarkan juga dengan fungsi alat dimana tidak melekat suatu nilai apapun, yang artinya bebas nilai. Namun demikian yang bebas nilai ini merupakan dasar dari perubahan masyarakat.³¹ Menurut Nasruddin Harahap perubahan nilai atau keyakinan yang tanpa goncangan diawali dengan perubahan dari hal-hal yang teknis. Ada hirarki dampak dari yang bersifat teknis sampai ke idiologis atau religi sebagai berikut: sub-sistem teknologi atau wilayah teknis akan berpengaruh pada mata pencaharian, lalu berpengaruh terhadap sub-sistem kesenian, kemudian sub-sistem

³¹ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 224.

bahasa, lalu akan berpengaruh pada pengetahuan, kemudian itu akan berdampak pada perubahan terhadap organisasi kemasyarakatan, dan terakhir akan mempengaruhi sistem keagamaan. proses perubahan dari yang paling atas kebawahnya cenderung lebih *alot*, oleh karena itu langkah tersebut dirubahlah sub-sistem yang paling mudah diterima dan tanpa nilai yaitu pada bagian yang teknis.³²

Isi pokok dari birokrasi adalah struktur birokrasi dan komunikasi (aktor birokrasi) dalam kasus negara Indonesia birokrasi diisi oleh orang-orang yang berpangkat eselon I ke bawah. Adapun struktur pegawai di negara Indonesia paling tinggi adalah eselon I, lalu eselon II, disusul eselon III, kemudian eselon IV, dan paling dasar adalah pegawai kontrak. Aktor-aktor tersebut yang menyusun sebuah program yang akan menjadi suatu kebijakan pemerintah.³³

3. Monitoring - Evaluasi Program dalam Birokrasi

Monitoring dan evaluasi sering disingkat menjadi “monev.” Monitoring dan evaluasi dua hal yang berbeda. Biasanya sebelum dievaluasi telah dilakukan monitoring. Tidak semua evaluasi mesti harus dilakukan monitoring terlebih dahulu, karena pada dasarnya kegiatan monitoring itu terpisah dan berbeda dengan evaluasi. Adapun perbedaan antara monitoring dan evaluasi sebagai berikut: monitoring atau sering disebut juga dengan pemantauan adalah usaha secara terus-menerus untuk

³² Nasruddin Harahap, *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: LkiS, 2011), 131.

³³ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi . . .*, 182-186.

memahami perkembangan bidang-bidang tertentu dari pelaksanaan tugas atau proyek yang sedang dilaksanakan.

Tujuan dari monitoring adalah untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan atau kesalahan sehingga dapat diluruskan dimana memastikan proses implementasi menuju kearah kebijakan yang dikehendaki. Ada jenis-jenis metode memonitoring yaitu: model survei lapangan, model diskusi kelompok dengan memanfaatkan para ahli, dan pengawasan di balik meja dengan memanfaatkan triangulasi data maupun triangulasi teori.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi manakala akan melakukan monitoring yaitu: monitoring tidak boleh mengganggu jalannya proses implementasi, pemonitoring tidak diperkenankan melakukan intervensi karena dapat menghilangkan peluang berkembangnya diskresi atau inovasi, pemonitor tidak boleh menyampaikan hasil monitoring kepada yang dimonitor, tetapi kepada atasan, pemonitor tidak diperkenankan mengambil anggota dari pelaksana, atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaksana.

Sedangkan evaluasi merupakan kelanjutan dari monitoring. Evaluasi adalah salah satu unit terkecil dari sebuah kebijakan adalah evaluasi. Tujuan dari evaluasi biasanya ditunjukan untuk menilai sejauh mana keefektifan program tersebut guna melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”. Adapun fungsi pokok dari evaluasi program

bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut.

Ciri-ciri dari evaluasi program sebagai berikut:³⁴

- a. Tujuannya menemukan hal-hal yang setrategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
- b. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat program, pelaksana program, dan target program.
- c. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.
- d. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
- e. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja.

Evaluasi program menurut waktunya dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebelum dilaksanakan, waktu dilaksanakan, dan sesudah dilaksanakan. Menurut Riant Nugroho evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses, sementara evaluasi setelah kebijakan disebut sebagai evaluasi dampak atau pengaruh.

Model-model evaluasi sebagai berikut:³⁵

- a. Model sistem, dengan indikator utamanya adalah efisiensi.
- b. Model perilaku, dengan indikator utamanya adalah produktivitas dan akuntabilitas.
- c. Model formulasi keputusan dengan indikator utamanya adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas.
- d. Model tujuan bebas, indikator utamanya adalah manfaat sosial.

³⁴ Riant Nugroho, *Public Policy* . . . , 674.

³⁵ *Ibid.*, 674.

- e. Model *review* profesional, indikator utamanya adalah penerimaan profesional.
- f. Model kuasi-legal, indikatornya adalah resolusi, dan
- g. Model studi kasus, indikator utamanya adalah pemahaman atas diversitas.

Ada empat macam jenis-jenis evaluasi sebuah program atau kinerja sebagai berikut.³⁶

- a. Evaluasi komparatif, yaitu membandingkan implementasi kebijakan (proses dan hasilnya) dengan implementasi kebijakan yang sama atau berlainan, di satu tempat yang sama atau berlainan.
- b. Evaluasi historikal, yaitu membuat evaluasi kebijakan berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan tersebut.
- c. Evaluasi laboratorium atau eksperimental, sebuah evaluasi namun menggunakan eksperimen.
- d. Evaluasi *ad hoc*, evaluasi yang dilakukan dengan dilakukan secara mendadak dalam waktu segera untuk mendapatkan gambaran pada saat itu juga.

Evaluasi dapat dilakukan dengan sistematis guna mempermudah dalam proses evaluasi. Adapun langkah-langkah untuk melakukan evaluasi antara lain:³⁷

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
- b. Analisis terhadap masalah.

³⁶ *Ibid.*, 677.

³⁷ *Ibid.*, 675.

- c. Diskripsi kegiatan yang akan dievaluasi.
- d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
- e. Menentukan apakah perubahan yang terjadi merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau dari kegiatan lain.
- f. Menentukan indikator untuk menilai suatu dampak.

4. *Culture Lag* dan Dampaknya

Perkembangan teknologi memberikan dampak perubahan sosial. Apabila perubahan teknologi tidak dibarengi dengan kemampuan mengoperasikan teknologi maka akan menimbulkan perilaku anomali. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aulya Nursyifa yang mengutip pendapatnya William F. Ogburn bahwa perubahan sosiokultural tidak secepat perubahan mental sehingga timbullah apa yang disebut dengan gegar teknologi (*culture lag*).

Penyebutan istilah *culture lag* mempunyai beragam versi diantaranya gegar teknologi, ketertinggalan budaya, atau gagap teknologi (gaptek). Dari berbagai versi istilah tersebut secara makna sama yaitu mengakui bahwa adanya kepanikan tidak mampu menggunakan teknologi. Peristiwa *culture lag* dapat terjadi pada masyarakat yang sedang mengalami evolusi teknologi.³⁸

Proses terjadinya gaptek menurut William F. Ogburn sebagaimana dikutip oleh Muhammad Adib ada empat fase meliputi; penemuan

³⁸ Aulia Nursyifa, "Kajian *Culture Lag* dalam Kehidupan Masyarakat Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan pada Era Globalisasi," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, 2018, 4.

(*invention*), yaitu dimana teknologi mulai diciptakan, akumulasi yang mana teknologi mengalami pertumbuhan yang berlipat-lipat, difusi, proses pertukaran diantara teknologi yang ditemukan, penyesuaian diri di mana suatu tahapan non-material dari budaya merespon temuan teknologi tersebut.³⁹

Pada tahapan penyembuhan atau normalisasi atau juga penyesuaian di dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami gaptek ada fase-fase yang harus dilalui. Menyandur dari fase *culture shock* yang mana mempunyai tahapan meliputi *honeymoon* suatu kondisi dimana individu mengalami perasaan bahagia, gembira, senang dengan situasi yang baru. Situasi yang baru tersebut ternyata tidak sejalan yang dipahami sehingga menimbulkan perasaan sedih, cemooh, benci, dll. Yang mana ini dinamakan dengan suatu situasi yang perlawanan atau krisis. Adanya sifat menerima pada setiap individu yang termanifestasi dalam proses belajar dari situasi yang baru tersebut sehingga menghasilkan tahap pemulihan secara perlahan. Dan pada tahap puncak pemulihan tersebut akan melahirkan proses adaptasi. Pada tahap adaptasi ini menandakan sudah hilangnya perasaan *shock* tersebut dan bertanda kondisi berjalan normal.⁴⁰

Dari teori yang telah peneliti paparkan di atas dapat diambil benang merahnya, *pertama* ada perbedaan antara kebijakan publik dengan kebijakan sosial, dan menyangkut seluk-beluk PKH tergolong dengan

³⁹ Muhammad Adib, "Ketika Pesantren Berjumpa dengan Internet: Sebuah Refleksi dalam Perspektif *Culture Lag*," *Jurnal Pusaka*, Vol. 1, No. 1, 2003, 9.

⁴⁰ Winda Fitricia A, *Studi Fenomenologi Perempuan Bercadar dalam Meminimalisir Culture shock di Padangsambian Denpasar* (Malang: Jurnal Komunikasi, 2014), 3.

kebijakan sosial dan ini sesuai dengan pola pembagian kebijakan sektoral yang mana ranah sosial ada di lembaga sosial atau Kementerian Sosial. Adapun tujuan dari kebijakan sosial adalah melakukan percepatan perubahan masyarakat dan dapat menyelesaikan konflik secara damai. *Kedua*, suatu kebijakan tidak lepas dari monitoring dan evaluasi (monev), dalam melakukan evaluasi tidak mesti dilakukan monitoring terlebih dahulu. Hal ini antara monitoring dengan evaluasi merupakan dua kegiatan yang berbeda. Pada penelitian ini termasuk ke dalam ranah evaluasi program. *Ketiga*, dari evaluasi tersebut tentunya menemukan temuan, dikarenakan temuan ini lingkupnya ada di ranah perilaku dan terkait dengan penggunaan teknologi, maka penulis meminjam analisisnya gear budaya atau gap teknologi guna menamakan temuan tersebut. Ketiga teori tersebut yang nantinya akan penulis gunakan untuk menguji penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode mempunyai peranan penting dalam menentukan suatu penelitian yang baik atau buruk. Peneliti mengumpulkan, mengklasifikasikan dan menganalisa fakta-fakta yang peneliti di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran pengetahuan sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Guna sampai pada tujuan tersebut dalam penelitian perlu menggunakan metode yang bisa dipertanggungjawabkan, oleh sebab itu metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan memilih lokasi tersebut pertama ada dampak dari program PKH yang disebabkan dari minimnya akses terhadap fasilitas penunjang PKH sangat minim. Ditambah lagi daerah Dlingo mempunyai susunan geografis yang terjal yang mana akses jalannya naik-turun sehingga sulit untuk dilalui.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dinamakan pendekatan diskripsi kualitatif. Di dalam menampilkan kajian penelitian ini disajikan tidak dengan data-data statistik tetapi hasil temuan tersebut diramu dan ditampilkan berupa diskripsi.⁴¹ Menurut Moleong seperti yang dikutip oleh Haris Herdiansyah, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek.⁴² Jadi peneliti sajikan dengan runtut dari awal sampai selesai menurut ukuran tahun dengan dikemas dengan bentuk narasi.

3. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama yang berkaitan dengan apa yang diteliti.⁴³ Subyek penelitian biasa ditemukan dengan memilih informan

⁴¹ Straus Anselm dan Corbin Julien, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Data*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 4.

⁴² Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 9.

⁴³ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali Press, 1990), 92.

di dalam pengambilan data di lapangan.⁴⁴ Subyek yang dapat memberikan data-data dan informasi yang diperlukan. Teknik yang peneliti gunakan awalnya menggunakan bola salju yang mana tanya terlebih dahulu dengan pendamping PKH. Cara ini peneliti gunakan dikarenakan peneliti belum tahu informan tersebut. Di tengah perjalanan peneliti kian memahami lokasi dan sumber-sumber informan maka peneliti tentukan sendiri sesuai kriteria dan informan yang paling mendekati dalam tema penelitian yang peneliti ajukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis sudah lama melakukan pengorganisasian masyarakat di wilayah Kecamatan Dlingo dan sering juga terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Sehingga teknik untuk mendapatkan data atau informasi sebagai bahan penelitian adalah menentukan orang-orang yang terlibat langsung di dalam proses pendampingan program keluarga harapan. Hal ini tentunya dengan bertanya langsung kepada informan tersebut dengan pertanyaan yang telah peneliti sipakan terlebih dahulu. Mengamati setiap proses pendampingan. Dan mencari data atau dokumen yang pernah dilakukan oleh pendamping PKH. Metode yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut agar dapat diamati oleh peneliti.⁴⁵ Peneliti melakukan pengamatan secara langsung

⁴⁴Sukardi, *Penelitian Subyek Penelitian*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995), 7.

⁴⁵ Dr. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 142.

di tempat-tempat dilakukannya pendampingan yang berada di Kecamatan Dlingo yaitu ikut di dalam pendampingan yang dilakukan pendamping PKH. Peneliti juga ikut pendamping PKH di dalam menyelesaikan berbagai kasus-kasus selama proses berlangsungnya implementasi program PKH.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁴⁶ Di dalam wawancara ini penulis susun terlebih dahulu pertanyaan yang akan ditanyakan. Ketika di lapangan daftar pertanyaan itu penulis hafal dan tidak saya lihatkan daftar pertanyaan tersebut kepada informan. Untuk membantu mengingat-ingat jawaban informan penulis melakukan perekaman dengan menggunakan alat komunikasi. Wawancara tersebut berjalan normal sebagaimana obrolan biasa. Adapun subyek dari penelitian ini adalah Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan yang ada di Kecamatan Dlingo yaitu: Rosyid Samsul, Abdul Rosid, Aziz Munahar, Reni Purwanti, Sutadi. Disamping itu juga ada beberapa keluarga penerima manfaat yang dimintai informasi atau data seperti Ibu Defi, Legiyem, Munawaroh, Kartini, Kartiyah, Sumini, Dasikem, Sukiyah, Rita Dwiningsih, Watini, Dan terakhir penulis juga mewawancarai kepala Dukuh Dlingo 1 Bapak Seno, salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa Ibu Supriyanti dan pelayan agen Trisrwinarsih.

⁴⁶*Ibid*, 133.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis⁴⁷. Peneliti menggunakan data dokumentasi yang dipunyai oleh pendamping PKH dalam kegiatan pendampingan. Tidak semua dokumen yang dimiliki oleh pendamping digunakan semua akan tetapi digunakan seperlunya saja. Selain itu peneliti juga mengikuti secara langsung proses pendampingan maka beberapa dokumen merupakan hasil dari dokumentasi peneliti.

Teknik dari metode dokumentasi ini diawali dengan menghimpun, memilih dan mengkatagorikan dokumen-dokumen sesuai dengan kebutuhan penelitian, mencatat dan mengambil gambar, sekaligus menghubungkan dengan fenomena yang lain dengan tujuan untuk memperkuat data. Pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada, arsip, foto, brosur serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisi data adalah suatu kegiatan mengelompokkan dan membuat suatu urutan serta menyingkat data sehingga mudah dibaca atau difahami dan kemudian di interprestasikan⁴⁸. Ada tiga model yang bisa digunakan untuk menganalisis data pada penelitian kualitatif yaitu: model perbandingan tetap adapun tokohnya Glasser dan Strauss. Model analisis spradley, dan terakhir model interaktif yang tokohnya bernama Miles dan

⁴⁷ Ibid, 152.

⁴⁸ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 419.

Heberman. Pada penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif yang terdiri dari tiga bagian:⁴⁹

a. Reduksi

Reduksi atau penyederhanaan yaitu dengan membuang data yang tidak perlu. Pada tahap ini data yang sudah terkumpul baik dalam bentuk wawancara maupun dokumentasi, dan catatan lapangan ditulis kembali dalam bentuk poin-poin. Pengelompokan poin-poin ini disesuaikan antar data yang penting dengan data yang tidak penting atau sesuai kebutuhan. Data yang berfungsi sebagai pendukung dengan data yang sebagai pelengkap. Kegunaan dari pengelompokan data adalah mempermudah dalam penyusunan penulisan penelitian, dan juga mempermudah dalam membandingkannya dengan data lain.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian cara yang untuk menyajikan data ada bermacam-macam, misalnya saja dalam penelitian kuantitatif sering menggunakan diagram, tabel, atau matrik. Sedangkan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan bentuk narasi, namun tidak menutup kemungkinan menggunakan tabel, hal ini dapat disesuaikan kebutuhan yang diperlukan dalam penyajian data. Pada penelitian ini lebih banyak menggunakan bentuk narasi, yang dilengkapi dengan tabel sebagai penunjang kemudahan dalam memahami data.

⁴⁹ Lexy Moloeng. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 287.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan ini semua data yang telah dipilah-pilah dan disesuaikan kemudian dikelompokkan menurut jenis yang sesuai dengan maksud penelitian. Setelah data dikelompokkan lalu ditampilkan dengan dijabarkan supaya orang lain ketika membaca tidak mengalami kebingungan, maka tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan didapat dari hasil pembacaan menyeluruh hasil penelitian, setelah itu baru menyimpulkan dengan akurat.

6. Teknik Validitas Data

Subyektivitas peneliti terkadang masuk dan mempengaruhi keabsahan suatu penelitian kualitatif. Bahwa sebuah penelitian subyektivitas sejauh mungkin harus dihilangkan. Seorang peneliti tentunya mengambil jarak dari sesuatu yang ditelitinya. Maka untuk menghindari subyektivitas penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Pengertian teknik ini adalah sebuah teknik untuk mencari keabsahan data yang memanfaatkan data satu dengan yang lain. Jadi hasil data yang telah didapatkan itu diuji dengan data yang sudah ada yang diakui keabsahannya. Dalam penelitian ini menggunakan tiga jalan alat perbandingan data yaitu: sumber, metode, dan teori. Secara ringkas sebagai berikut:⁵⁰

- a). Membandingkan data dari hasil pengamatan peneliti dengan hasil wawancara.

⁵⁰ *Ibid*, 331.

- b). Membandingkan apa yang dikatan subyek peneliti di depan umum dengan perkataan yang dikatakan secara pribadi.
- c). Pengecekan sumber data yang sama dengan metode yang berbeda atau sebaliknya pengecekan sumber data yang berbeda tetapi dengan metode yang sama.
- d). Membandingkan dengan teori-teori yang sudah ada dan sudah diakui keabsahannya.

G. Sistematika Pembahasan

Di dalam kerangka penelitian ini mengangkat tema secara umum dampak kebijakan sosial yang mana lokus dari kebijakan sosial adalah pembangunan sosial yang di dalamnya ada kesejahteraan sosial dan intervensi sosial untuk menuju pada kamakmuran masyarakat. Tetapi secara sempit penelitian ini bercangkol pada program pemerintah dalam hal ini program penanggulangan kemiskinan yang mana ada sebuah kebijakan yang dibungkus dalam program keluarga harapan. Guna mensistematiskan atau mempermudah untuk dipahami berikut penulis uraikan secara singkat penjelasan perbab. Bab 1 merupakan pendahuluan, yang mana berisi latar belakang masalah yang diteliti, pertanyaan penelitian, kajian pustaka, teori-teori yang digunakan, dan metodologi yang peneliti gunakan untuk membedah tema penelitian ini.

Bab 2 menampilkan profil daerah tempat penelitian ini diangkat yang meliputi sejarah PKH dari tahun 2008 sampai saat ini, serta bisnis proses PKH, yang mana tujuan utama dari program ini adalah memutus rantai

kemiskinan dan melalui program ini juga terdorong untuk menumbuhkan wirausahawan baru yang lahir dari kalangan ekonomi menengah bawah. Di samping itu juga mengupas alur prosedural kebijakan program keluarga harapan dan ini merupakan langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh lembaga.

Bab 3 berisi akar sejarah dari penyesuaian masyarakat dunia yang menuntut untuk dimodernkan. Atas alasan keinginan untuk sampai pada modern tersebut maka kebutuhan teknologi merupakan suatu keniscayaan dan harus segera diimplementasikan. Transaksi non tunai membawa kemudahan dan mengurangi kelemahan-kelemahan yang ditimbulkan dengan transaksi tunai.

Sedangkan bab 4 mengupas secara mendalam mengupas implementasi dan implikasi yang muncul dari penerapan program baru penanggulangan kemiskinan. Perlu untuk digaris bawahi bahwa kadang kala tujuan yang bagus dari sebuah program terhenti karena masyarakat belum siap untuk berubah secara radikal. Perubahan yang radikal akan memunculkan dampak-dampak yang baru dan sifatnya sulit untuk diselesaikan. Dari sana memang perlu keterbukaan pelayanan, artinya sebagai pelayan masyarakat tidak memandang siapa yang dilayani tetapi melayani siapa saja yang datang untuk dilayani. Sementara untuk bab 5 merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diajukan dari hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari urain dan analisis data dari bagian sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa proses konversi bantuan dari tunai menjadi non tunai yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dalam Program Keluarga Harapan telah menimbulkan dampak baru di luar dampak-dampak yang direncanakan. Mengingat alasan mendasar mengapa PKH perlu untuk dikonversi pada mekanisme penyaluran adalah mengejar 3T: tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Hasilnya mengarah pada 3T tersebut.

Soal tepat jumlah di sini mengacu pada peraturan menteri yang mengatur besar kecil jumlah bantuan yang diduplikatnya keluarga penerima manfaat. Hanya saja menemukan ketidak sinkronnya data yang mana harusnya tergolong komponen lansia malah mendapatkan komponen seperti anak sekolah dan begitu sebaliknya. Hal semacam ini hanya masalah teknis yang mana datanya sangat rumit dan dapat diatasi manakala ada koordinasi yang intens antara pendamping dengan operator. Masih dalam misteri setiap pencairan masih ditemukan saldo nol dan dari penelusuran pendamping saldo nol tersebut disebabkan karena data yang rumit tersebut ditambah jumlahnya yang banyak sehingga satu-dua keluarga penerima manfaat tercecer sehingga terjadilah saldo nol.

Dari rumusan 3T tersebut yang diimplementasikan telah menimbulkan *culture lag* atau gagap teknologi yang dapat peneliti rinci sebagai berikut: pin keblokir, saldo nol, penyelewengan bantuan yang dilakukan beberapa kelompok, inefisiensi kontrol penyaluran, akses penyaluran, teknis aduan, dan gagapnya penyaluran bantuan. Ada faktor lain yang menjadi pemicu terjadinya dampak baru itu muncul diantaranya adalah akses terhadap layanan perbankan seperti jarak rumah keluarga penerima manfaat terhadap bank jauh, tidak adanya loket ATM. Akses jalan yang naik-turun dan curam juga turut andil dalam melahirkan dampak tersebut.

Apabila menggunakan pendekatan gagap teknologi bahwa terjadinya *culture lag* tidak akan terjadi lama, akan ada masa penyesuaian dan adaptasi dari keluarga penerima manfaat. Sehingga setelah masa adaptasi telah usai masyarakat akan kembali tenang dan pastinya akan menikmati kemudahan teknologi yaitu terwujud dari nyamannya menggunakan ATM.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik klausul bahwa program atau kebijakan yang baru yang mana terkait dengan teknologi dan masyarakat sebagai sasaran belum mengenalnya maka akan mendorong terciptanya gagap teknologi (*culture lag*). Hasil intervensi melalui PKH juga menimbulkan perubahan sosial terbukti dengan hadirnya warung-warung jejaring yang sebelumnya tidak ada dan menjadi pembenar bahwa perubahan sosial harus dikawal bukan dibiarkan tanpa arah. Sejarah ada

ditangan manusia, masa depan adalah rekayasa manusia. Begitulah adagium zaman modern.

B. Saran

Saran di sini dimaksudkan untuk dikembangkan lagi penelitian lanjutan yang terkait dengan Program Keluarga Harapan yaitu menyoyal sasaran penerima PKH apakah sudah sesuai kriteria yaitu kelompok 13% ke bawah dari data Basis Data Terpadu. Di samping itu juga terkait dengan meta analisis data perencanaan yang dalam pandangan peneliti belum banyak yang mengupas. Semoga penelitian ini menjadi informasi dan pelengkap data bagi yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Muhammad. "Ketika Pesantren Berjumpa dengan Internet: Sebuah Refleksi dalam Perspektif *Culture Lag*," *Jurnal Pusaka*, Vol. 1, No. 1, 2003.
- Badan Pusat Statistik, diakses pada tanggal 13 November 2016.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Fitricia, Winda. A. "Studi Fenomenologi Perempuan Bercadar dalam Meminimalisir Culture shock di Padangsambian Denpasar," *Jurnal Komunikasi*, Malang: 2014.
- Giddens, Anthony, *Masa Depan Politik Radikal* terj. Dariyatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Harahap, Nasruddin. *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta, Lkis, 2011.
- Hatma, Pajar. I. J. *Analisis Masalah Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 2008.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Isnaini, Khaidiziah. *Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto: Jurnal Administrasi Publik*, Universitas Brawijaya, Vol.2, No.4, 2015.
- Kristian, Sonny. *Culture shock dan Negosiasi Identitas diri di Lingkungan baru*, Malang: Universitas brawijaya Malang, karya tidak diterbitkan.

- Kumorotomo, Wahyudi. *Desentralisasi Fiskal*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Lexy Moloeng. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mas'ud, Abdurrahman. *Peningkatan Integritas Birokrasi Arah Baru Disiplin Pegawai*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.
- Modul Bimtek Program Keluarga Harapan tahun 2016.
- Moran, Michael, dkk, *Handbook Kebijakan Publik*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Pancasila Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- Muslim, Aziz. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nugroho, Riant. *Change Management untuk Birokrasi*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2013.
- Nugroho, Riant. *Gender dan Administrasi Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2011.
- Nursyifa, Aulia. “Kajian *Culture Lag* dalam Kehidupan Masyarakat Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan pada Era Globalisasi,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Santoso, Purwo. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2010.
- Soetomo, *Strategi-Strategi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Straus Anselm dan Corbin Julien, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Data*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Sukardi, *Penelitian Subyek Penelitian*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995.
- Suryawati, Chriswardani. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensioal*: *Jurnal JMPK* Vol. 08, No. 03, 3 September 2005.
- Tatang, M. Arifin. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: CV Rajawali Press, 1990.

Usman, Sunyoto. *Esai-Esai Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Winarno, Budi. *Gagalnya Organisasi Desa dalam Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

Winarno, Budi. *Globalisasi: Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, Yogyakarta: CAPS, 2016.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Riswantoro
Tempat/tgl. Lahir : Bantul/07 Agustus 1989
Alamat : Kalidadap 1 RT 004, Selopamioro, Imogiri, Bantul,
D.I. Yogyakarta
Kode Pos : 55782
Agama : Islam
Status Pernikahan : Kawin
Nama Ayah : Wanto Utomo
Nama Ibu : Ngadirah
Email : riswanda89@gmail.com
NO. HP : 085 643 792 648

B. Riwayat Pendidikan :

1. SD N 1 Kalidadap 1 Kab. Bantul, tahun lulus 2003
2. SMP Ma'arif Imogiri Kab. Bantul, tahun lulus 2007
3. SMA N 1 Pleret, Pleret, Kab. Bantul, tahun lulus 2010
4. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun lulus 2015

C. Riwayat Pekerjaan

1. Yayasan Sosial dan Panti Dhuafa Hafara Yogyakarta.
2. Pendamping Sosial di Kecamatan Dlingo.

D. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Pemuda di Kampung Kalidadap 1
2. Anggota Lembaga Press Mahasiswa ARENA
3. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Yogyakarta
4. Anggota Ansor Cabang Imogiri
5. Anggota Banser Cabang Imogiri

E. Minat Keilmuan : Kajian Kebijakan Publik dan Isu-Isu Agama

F. Karya Ilmiah Jurnal

1. "Peran Gasebo Sebagai Pengungkit Pengembangan Ekonomi Lokal: Studi di Tiga Dusun di Wukirsari, Imogiri, Bantul." Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam tahun 2013.

2. “Penyaluran dari Tunai ke Non Tunai: Studi Peran Pendamping dalam Mengawal Konversi Bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Dlingo.” Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam tahun 2018.

G. **Hobi** : Bertani

